



Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Banu Sulaeman Mubaraq¹, Aida Alfita², Anasya Maulikha Rahma³, Dandi Aulia Nurfaizi⁴

¹²³⁴Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bina Bangsa

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 27, 2024

Revised Oktober 29, 2024

Accepted November 15, 2024

Available online 24 November, 2024

Keywords:

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tata Kelola Pemerintahan, Pendapatan Daerah

Keywords:

Utilization of Information and Communication Technology, Governance, Regional Income



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata. Pendekatan berbasis TIK, yang dikenal sebagai *e-tourism*, memungkinkan pemasaran destinasi wisata secara global tanpa batasan jarak dan waktu. Penerapan sistem informasi terpadu melalui *Destination Management Organisation* (DMO) melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan efektif. Namun, kendala seperti kurang optimalnya infrastruktur TIK, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antarlembaga yang belum maksimal menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan ini. Dengan mengintegrasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, literasi teknologi, dan partisipasi masyarakat, Kabupaten Kuningan dapat memperkuat daya saing pariwisata daerah, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendorong pembangunan yang seimbang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran TIK dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan dan dampaknya terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

optimalisasi TIK dalam sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya tarik wisata daerah sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi yang unggul di Jawa Barat.

ABSTRACT

The use of Information and Communication Technology (ICT) has become one of the strategic efforts of local governments in encouraging the development of the tourism sector. An ICT-based approach, known as e-tourism, enables the marketing of tourist destinations globally without the limitations of distance and time. The implementation of an integrated information system through the Destination Management Organization (DMO) involves collaboration between the government, private sector, and the community, which aims to create sustainable and effective tourism management. However, obstacles such as suboptimal ICT infrastructure, limited resources, and less than optimal coordination between institutions are challenges in implementing this policy. By integrating the principles of good governance, technological literacy, and community participation, Kuningan Regency can strengthen the competitiveness of regional tourism, support local economic growth, and encourage balanced development. This study uses a qualitative descriptive approach to analyze the role of ICT in tourism development in Kuningan Regency and its impact on PAD. The results of the study indicate that optimizing ICT in the tourism sector has great potential to increase the attractiveness of regional tourism while strengthening the position of Kuningan Regency as a superior conservation district in West Java.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang terus berkembang, kemajuan teknologi membawa perubahan signifikan dalam cara manusia berkomunikasi. Transisi dari metode komunikasi tradisional yang bersifat monolog menuju komunikasi digital menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Perkembangan ini semakin dipercepat oleh dampak pandemi COVID-19, yang tidak hanya melumpuhkan perekonomian global tetapi juga membawa perubahan besar dalam aspek sosial masyarakat. Pandemi tersebut memaksa perubahan drastis dalam kebiasaan sehari-hari. Aktivitas yang sebelumnya dianggap normal kini berubah menjadi sesuatu yang asing, menciptakan tatanan baru yang dikenal sebagai *New Normal*. Dalam kondisi ini, masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dan menghadapi tantangan baru, termasuk

*Corresponding Author

Email: banusm18@gmail.com¹, aidaalfita2929@gmail.com², Maulikhaanasya@gmail.com³, aulianurfaidzidandi@gmail.com⁴

mengintegrasikan inovasi teknologi dan media sosial ke dalam berbagai aspek kehidupan (April Laksana, Rizqi Fitrianti, Ali Humadi, 2022)

Salah satu sektor yang dapat meningkatkan perekonomian adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sumber devisa bagi negara dan juga sumber pendapatan daerah. Keberagaman potensi pariwisata suatu daerah merupakan modal besar dalam pengembangan pariwisata. Pengembangan dan pembinaan pariwisata dapat dilakukan dengan memilih salah satu objek wisata yang dapat menjadi industri unggulan, karena secara keseluruhan pembangunan pariwisata memerlukan biaya yang besar. (Kenedi, Irwan Sukmawan, April Laksana, 2022). Penerapan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) merupakan salah satu standar manajemen modern. Otonomi daerah, otonomi administrasi daerah, dan kriteria pelaksanaan kebersihan dan tata kelola yang baik tidak bisa dihindari. Sejumlah konsep mengenai pemanfaatan teknologi telah disajikan dalam upaya untuk mendefinisikan pemerintahan yang efektif (Eli Apud Saepudin, April Laksana, Ita Rosita Wahyiah, 2024). Hal ini dikarenakan pemerintah daerah, terutama yang berada di daerah era otonomi, semakin ditekan untuk bekerja lebih baik, otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sukses. Sepuluh konsep tata pemerintahan yang baik dapat diusulkan sebagai rekomendasi sementara untuk pemerintah daerah, kota, dan kabupaten Indonesia karena mereka mewakili keyakinan dasar tentang tata pemerintahan yang baik, yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, serta profesionalitas.

Pemerintah daerah Kuningan telah menyusun pedoman pembangunan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Menurut pejabat pemerintah kabupaten Kuningan, tata kelola yang baik terkait dengan upaya tata kelola dan pelayanan dari sudut pandang pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan membuat usulan visi dan misi dalam situasi ini, namun diperlukan juga tata kelola yang kuat untuk mendukungnya. Dengan Iman dan Taqwa Kuningan sebagai Kabupaten Maju Agropolitan dan Pariwisata di Jawa Barat Tahun 2027 merupakan visi yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, dan salah satu dari enam tugas yang akan dikembangkan adalah menciptakan manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia dan sumber daya yang baik.

Selain sektor pariwisata, kontribusi pembangunan desa juga dapat diwujudkan melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes merupakan salah satu bentuk implementasi kewenangan desa yang diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Desa, serta pedoman pelaksanaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Selain itu, landasan hukum ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur kewenangan desa.

BUMDes hadir sebagai lembaga ekonomi baru di tingkat desa yang dirancang oleh pemerintah untuk memberdayakan perekonomian masyarakat lokal. Lembaga ini memiliki dua peran utama: pertama, sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, dan kedua, sebagai alat untuk mengelola sumber daya alam maupun manusia yang ada di desa. Dengan mengedepankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, BUMDes dapat menjadi platform bagi masyarakat desa untuk bersama-sama mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan (Kenedi, Fatur Rahman, Irwan Sukmawan, April Laksana, 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji, meliputi:

1. Bagaimana upaya penggunaan TIK pada sektor pariwisata di kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana kabupaten Kuningan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pariwisata?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini didasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk mengkaji objek penelitian dalam kondisi alami (bukan melalui eksperimen). Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi atau gabungan, dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati langsung situasi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penggunaan TIK Pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Kuningan

Tujuan dari dibangunnya Kabupaten Kuningan adalah untuk memperkuat integritas dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Kuningan sehingga mereka dapat bekerja sama untuk

memajukan negara dan masyarakat yang mendalam nilai-nilai moral dan karakter agama berbasis, serta kesehatan masyarakat, literasi informasi, keterampilan mata pencaharian, dan sikap peduli lingkungan. Diharapkan sumber daya manusia Kabupaten Kuningan mampu bersaing dengan daerah lain yang lebih maju dengan memiliki kualitas yang tinggi di semua daerah tersebut. Pemerintahan kabupaten Kuningan juga menonjolkan industri pariwisata yang terdapat dalam daerah tersebut. Industri pariwisata yang berkembang telah terkenal sebagai sumber devisa yang signifikan, bersama dengan infrastruktur terbelakang di kawasan ini dan masalah hubungan internasional. Sektor pariwisata saat ini berkembang dengan pesat. Walaupun hal ini tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, namun sangat disayangkan masih banyak dinas pariwisata daerah di Indonesia yang belum memanfaatkannya. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia memerlukan strategi yang inovatif dan adaptif, terutama untuk memastikan keberlangsungan sektor akomodasi di tengah tantangan pasca-pandemi. Salah satu pendekatan yang relevan adalah dengan memanfaatkan perubahan perilaku wisatawan, seperti tren bekerja jarak jauh, melalui program *Work from Hotel* (WFH) yang menawarkan fasilitas mendukung produktivitas kerja, atau menyediakan paket wisata *staycation* yang menarik bagi wisatawan domestik. Strategi ini harus didukung oleh aspek keamanan dan kenyamanan selama menginap, yang dapat diwujudkan melalui implementasi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (CHSE). Sertifikasi CHSE menjadi komponen penting yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan wisatawan, tetapi juga menjadi bukti komitmen hotel dalam menjaga kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. (April Laksana, Kenedi, Basuki Rakhim Setya Permana, 2022)

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan oleh pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan suatu daerah dari segi ekonomi dan infrastruktur, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam tujuan membangun masyarakat yang memiliki literasi teknologi mumpuni. Pembangunan industri pariwisata dituntut untuk memajukan pemerataan kesempatan dan lebih siap menghadapi tantangan perubahan lingkungan lokal, nasional, dan internasional dengan tetap menjaga nilai-nilai agama, norma budaya, dan kelestarian lingkungan hidup, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Masalah utama yang ditunjukkan oleh penelitian ini adalah implementasi strategi TIK di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, belum berdampak besar pada pertumbuhan pariwisata karena belum sempurna.

Ketentuan undang-undang tersebut cukup jelas menunjukkan bahwa pembangunan desa menjadi fokus eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan pemahaman yang lebih besar, seperti menjadikan dusun sebagai tujuan wisata dengan memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan manusianya. Memanfaatkan sumber daya yang ada akan memungkinkan pembangunan desa melalui penciptaan zona pariwisata, yang mengarah pada penciptaan apa yang dikenal sebagai "Desa Wisata". Pada akhirnya, masyarakat akan diuntungkan dengan memaksimalkan potensi lokal yang ada di daerah tersebut.

Penduduk Kabupaten Kuningan menganut berbagai tradisi budaya dan memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga memiliki cita-cita yang tinggi terhadap pertumbuhan destinasi di industri pariwisata. Hal itu diperjelas dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Hal ini dikarenakan selama ini hanya desa yang diakui sebagai daerah pedalaman untuk kawasan perkotaan, maka Pemkab Kuningan bermaksud membangun desa dengan aspek pariwisata berdampingan dalam pembangunan daerah. Pada Kabupaten Kuningan, pembangunan desa dengan komponen wisata telah melibatkan sejumlah pihak terkait dalam berbagai tahapan proses dan seleksi. Terakhir, disebutkan bahwa Kabupaten Kuningan berpotensi membangun komunitas wisata di sejumlah kecamatan atau kawasan desa. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memainkan peran penting dalam pertumbuhan komunitas wisata. Tujuannya adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan kesejahteraan masyarakat setempat. Pertimbangan strategis untuk warisan budaya termasuk mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam konservasi sumber daya atas dasar kekuatan nilai-nilai budaya. Manfaat pengelolaan pariwisata dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, yang ikut serta dalam pelaksanaannya secara penuh..

Pengelolaan berbasis pariwisata yang merupakan salah satu faktor pendorong tumbuhnya sektor terkait pariwisata di Kabupaten Kuningan adalah teknologi informasi. Hal ini identik dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran pariwisata. E-tourism, atau pariwisata elektronik, adalah istilah kontemporer yang digunakan dalam industri perjalanan untuk menggambarkan kemampuan teknologi informasi. Dengan bantuan prakarsa pemerintah daerah, kini ada peluang baru yang signifikan untuk menerbitkan dan mempromosikan paket wisata daerah di seluruh dunia menggunakan internet, menghilangkan hambatan utama jarak dan waktu.

Ketersediaan media berbasis internet ini dapat mendongkrak daya guna dan daya saing dalam penyampaian jasa pariwisata berbasis telematika kepada konsumen internal, membuat penyelenggara pemasaran pariwisata lebih mudah diakses oleh calon wisatawan. Kemajuan saat ini dalam penyebaran pariwisata elektronik telah berfokus pada memperbarui informasi yang diperlukan untuk memfasilitasi perjalanan bagi calon pengunjung melalui sistem informasi terpadu manajemen atau Destination Management Organizations (DMOs).

Dengan beroperasinya DMO ini diharapkan akan terjadi keseimbangan pembangunan di kawasan tersebut karena telah dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi, dan masyarakat terkait dengan pengelolaan pariwisata. Pengembangan DMO sebagai paradigma manajemen baru Pariwisata daerah sangat penting untuk penggunaan TIK dalam industri pariwisata. Setiap manajemen dapat memasarkan dan menjual berbagai pilihan paket atau produk perjalanan dengan menggunakan TIK/Internet, menjadikan perjalanan yang alami, budaya, atau artistik mudah diakses dan tanpa batasan. Jaringan Dalam lingkup sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan, virtual ini membentuk rantai nilai yang menghubungkan kepentingan ekonomi dengan kepentingan lainnya.

Pengelolaan pariwisata berbasis teknologi informasi menjadi salah satu kunci utama dalam memajukan industri kepariwisataan di Kabupaten Kuningan. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sektor ini dikenal dengan istilah *e-tourism* atau pariwisata elektronik. Konsep ini melibatkan penggunaan platform digital untuk pemasaran destinasi wisata, yang memungkinkan promosi daerah dilakukan secara luas hingga ke seluruh dunia tanpa terhalang oleh jarak dan waktu.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong penggunaan TIK untuk pengembangan sektor pariwisata. Kebijakan ini membuka peluang besar bagi Kabupaten Kuningan untuk memperkenalkan berbagai paket wisata unggulan melalui media Internet. Dengan pendekatan digital, publikasi destinasi wisata menjadi lebih efektif, efisien, dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, teknologi ini memungkinkan layanan pariwisata disediakan dalam bentuk telematika, yang memudahkan calon wisatawan dalam mengakses informasi, memesan layanan, dan merencanakan kunjungan mereka secara lebih fleksibel.

Saat ini, pengembangan *e-tourism* di Kabupaten Kuningan telah bergerak ke arah pemutakhiran data dan penyediaan informasi yang terintegrasi. Salah satu pendekatan utama adalah penerapan *Destination Management Organisation* (DMO), yaitu sistem pengelolaan informasi terpadu yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, perusahaan swasta, organisasi profesi, dan masyarakat. DMO dirancang untuk mengelola seluruh aspek kepariwisataan secara komprehensif dan kolaboratif, sehingga menciptakan harmoni dalam pembangunan wilayah (Mulyono Yalia, 2014).

Pengembangan DMO tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga memberikan kontribusi pada pembangunan wilayah secara keseluruhan. Dengan mengoptimalkan potensi TIK dalam pengelolaan pariwisata, DMO berperan dalam menciptakan keseimbangan pembangunan wilayah. Misalnya, pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, penerapan DMO juga mendukung prinsip keberlanjutan, di mana setiap pengembangan destinasi wisata tetap memperhatikan aspek lingkungan dan budaya lokal. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya menjadi sektor ekonomi yang menguntungkan, tetapi juga berperan dalam melestarikan warisan alam dan budaya (Mulyono Yalia, 2014).

Upaya kabupaten Kuningan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata

Wilayah Ciayumajakuning yang mencakup “Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan”, telah muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di Jawa Barat setelah Bandung Raya. Dengan proyeksi hingga tahun 2028, kawasan ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang prestisius, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga sebagai salah satu magnet ekonomi di Asia Tenggara.

Wilayah strategis Ciayumajakuning ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu kawasan perkotaan strategis yang dirancang untuk mengembangkan aktivitas ekonomi berskala internasional, nasional, maupun antarprovinsi. Kawasan ini memiliki potensi besar untuk berkembang karena berbagai keunggulan. Dari segi sumber daya alam, wilayah ini kaya dengan potensi hayati dan non hayati. Selain itu, posisi geografis yang strategis menghubungkan Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta, serta keberagaman topografinya yang mencakup wilayah perairan, pesisir, dataran, hingga pegunungan, semakin mendukung potensinya. Pada cakupan wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu dikenal sebagai kawasan pesisir, sementara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan menonjol dengan lanskap pegunungan.

Kondisi ini menjadikan Ciayumajakuning sebagai lokasi prioritas pembangunan infrastruktur strategis, terutama di sektor transportasi darat, laut, dan udara. Beberapa infrastruktur unggulan yang telah dan sedang dikembangkan meliputi Bandara Internasional Kertajati, Tol Cipali, Tol Cisumdawu,

serta Pelabuhan Cirebon. Semua ini memberikan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang kawasan tersebut. Di antara wilayah Ciayumajakuning, Kabupaten Kuningan dikenal dengan komitmennya sebagai kabupaten konservasi yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kuningan 2005-2025 dan dikuatkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, yang menetapkan pariwisata sebagai komponen utama pembangunan daerah. Namun, meskipun telah diidentifikasi sebagai sektor unggulan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kuningan masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi sektor pariwisata belum sepenuhnya tercapai. Padahal, Kuningan memiliki potensi wisata yang luar biasa, termasuk keindahan alam pegunungan, kawasan konservasi, serta berbagai destinasi wisata budaya dan sejarah yang dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional.

SIMPULAN

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sektor pariwisata Kabupaten Kuningan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implementasi *e-tourism* yang melibatkan promosi berbasis digital serta pengelolaan destinasi melalui *Destination Management Organisation* (DMO) menawarkan berbagai manfaat, seperti efisiensi promosi, kemudahan akses informasi, dan peningkatan kualitas layanan pariwisata. Namun, meskipun potensinya besar, implementasi kebijakan berbasis TIK masih menghadapi kendala, seperti kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan kurang optimalnya infrastruktur teknologi.

Sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan juga dihadapkan pada tantangan lain, seperti rendahnya kontribusi terhadap PAD meskipun potensi wisata yang dimiliki sangat besar. Optimalisasi sektor ini memerlukan penguatan tata kelola yang baik, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan infrastruktur yang memadai untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial.

SARAN

Kabupaten Kuningan perlu memperluas penerapan TIK dalam pengelolaan pariwisata, termasuk peningkatan kualitas platform digital dan penyediaan akses internet yang merata. Pemutakhiran informasi destinasi secara real-time harus diprioritaskan untuk mempermudah calon wisatawan. Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat memperluas strategi pemasaran pariwisata melalui media digital dengan memanfaatkan media sosial, situs web resmi, dan platform perjalanan global.

REFERENSI

- April Laksana, Kenedi, Basuki Rakhim Setya Permana, (2022), Digital Tourism Development Strategy As A Promotion Of Creative Economy Tourism In Banten Province, *Jurnal Ekonomi*, 11(1), 631-638
- April Laksana, Rizqi Fitrianti, Ali Humadi, (2022), Sosialisasi Pengembangan Media Dalam Pemanfaatan Tv Digital Di Desa Banyumas, *Jipam : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 121-180
- Edwards Iii, George C. (1980) *Implementing Public Policy*. Washington Dc: Congressional Quarterly, Inc.
- Eli Apud Saepudin, April Laksana, Ita Rosita Wahyiah, 2024, Pelayanan Publik Di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Berdasarkan Tata Kelola Taat Asas, *Pandita: Interdisciplinary Journal Of Public Affairs*, 7(1), 16-24
- Juju Junaedi, (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Desa Wisata Di Kabupaten Kuningan Tahun 2020. *Janitra*, 2(2), 250-259
- Kenedi, Fatur Rahman, Irwan Sukmawan, April Laksana. (2023), Optimalisasi Potensi Desa: Sosialisasi Komprehensif Pembentukan Bumdes Dari Perspektif Ekonomi, Manajemen Dan Regulasi Hukum, *Communnity Development Journal* 4(4), 7030-7037
- Kenedi, Irwan Sukmawan, April Laksana, (2022), Evaluation Of The Economic Potential Of Coastal Tourism Strategic Area Of Anyer Tourism – Cinangka, *Jurnal Ekonomi*, 11(1), 611-618
- Mulyono Yalia. (2014). Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Pemanfaatan Tik Bagi Pengembangan Kepariwisata Daerah. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 18(3), 255-264
- Mochamad Isnaeni Ramdhan. (2018). Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Kabupaten Kuningan Jawa Barat (Rintisan Penyusunan Pedoman). *Journal Of Business And Entrepreneurship*, 1(1), 35-44
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Pt Alfabet